

Petunjuk A: Pilih satu jawaban yang paling tepat

1. Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2010 mengatur tentang...
 - A. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional 2010—2011
 - B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010—2014
 - C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025
 - D. Rencana Pembangunan Daerah 2010—2014
 - E. Rencana Pembangunan Nasional 2010—2014
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 yang ditetapkan dalam...
 - A. UU Nomor 17 Tahun 2006
 - B. UU Nomor 18 Tahun 2007
 - C. UU Nomor 17 Tahun 2008
 - D. UU Nomor 18 Tahun 2008
 - E. UU Nomor 17 Tahun 2007
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang...
 - A. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
 - B. Sistem Perencanaan Pembangunan Wilayah Barat (SPPWB)
 - C. Sistem Perencanaan Pembangunan Wilayah Timur (SPPWT)
 - D. Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi (SPPP)
 - E. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)
4. Usaha pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat diusahakan masyarakat dapat menikmati dilakukan dengan berbagai kegiatan, *kecuali*...
 - A. subsidi
 - B. Jamkesmas
 - C. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - D. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - E. UMKM
5. Visi pembangunan Nasional Tahun 2005—2025 adalah...
 - A. Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur
 - B. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
 - C. Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan sejahtera
 - D. Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan makmur
 - E. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera
6. Berikut adalah Misi Pembangunan Nasional Indonesia, *kecuali*...
 - A. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing
 - B. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

- C. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
- D. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
- E. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan di Asia Tenggara
7. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi beberapa prioritas nasional sesuai misi dan visi pemerintah 2010—2014, *kecuali...*
- A. reformasi birokrasi dan tata kelola
- B. infrastruktur
- C. kesehatan
- D. ketahanan pangan
- E. militer
8. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN 2005—2025, *kecuali...*
- A. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatera
- B. Meningkatkan keterkaitan antar-wilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik
- C. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
- D. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana
- E. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
9. Membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar mereka berdaya dan akhirnya mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas, merupakan tujuan utama dari program...
- A. PNPM Mandiri
- B. JPS
- C. Bantuan Langsung Tunai
- D. Program Keluarga Harapan (PKH)
- E. UMKM
10. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA yang diadakan pemerintah ditujukan untuk...
- A. Pemerataan pendidikan
- B. Studi banding mutu pendidikan antardaerah
- C. Pemetaan hasil pendidikan
- D. Menentukan kelulusan
- E. Menilai pencapaian kompetensi lulusan
11. Program pemerintah Jaring Pengaman Sosial (JPS) bertujuan untuk...
- A. Mengatasi kemiskinan
- B. Pemerataan pendapatan
- C. Mengurangi dampak krisis ekonomi
- D. Membantu program desa
- E. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa miskin

kegiatannya, yaitu riset dan analisa, *consensus building*, dan kerjasama teknik. Organisasi internasional yang dimaksud adalah...

- A. UNCTAD
- B. UNDP
- C. WTO
- D. UNIDO
- E. FAO

19. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan...

- A. 162 negara dan 8 kawasan
- B. 163 negara dan 8 kawasan
- C. 164 negara dan 7 kawasan
- D. 165 negara dan 8 kawasan
- E. 166 negara dan 9 kawasan

20. Kerja sama multilateral yang dilakukan melibatkan organisasi berikut, *kecuali*...

- A. G77 dan Cina
- B. NAM
- C. WTO (Tourism)
- D. South Center
- E. UNHCR

21. Untuk mengantisipasi kondisi darurat listrik pada tahun 2010, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menyehatkan PLN, *kecuali*...

- A. Meningkatkan margin dari 5% menjadi 8%
- B. Pembangunan pembangkit listrik di desa
- C. Rasionalisasi Tarif Dasar Listrik
- D. Subsidi terarah ke masyarakat miskin
- E. Memberikan pinjaman tanpa bunga

22. *National Single Window (NSW)* adalah suatu sistem yang memungkinkan: *single submission of data and information; single and synchronous processing of data and information; dan single decision-making for customs release and clearance of cargoes*. Keuntungan penerapan NSW di Indonesia, *kecuali*...

- A. Memfasilitasi percepatan proses penyelesaian kegiatan *customs release and clearance of cargoes*
- B. Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberi kepastian usaha.
- C. Menciptakan manajemen keuangan yang lebih baik, menghilangkan redundansi dan duplikasi data meningkatkan validitas dan akurasi data.
- D. Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor.
- E. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman serta mengoptimalkan penerimaan negara

29. Kebijakan pemerintah untuk mengambil bagian dalam CAFTA yang mulai berlaku di awal tahun 2010 akan memberikan dampak...
- Buruk bagi kelangsungan industri di Indonesia
 - Biasa-biasa saja, artinya kelangsungan produk Indonesia tidak terpengaruh
 - Positif bagi kelangsungan industri di Indonesia apabila kita pintar memanfaatkannya
 - Mematikan industri kecil di Indonesia
 - Mempersempit pasar produk dan barang Indonesia
30. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibuat pemerintah ditujukan untuk masyarakat dalam pembiayaan pengobatan, terutama untuk membeli obat. Untuk itu, pemerintah memproduksi obat...
- paten
 - generik
 - assembling
 - OTC
 - bermerek
31. Tugas dan wewenang Undang-undang No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut...
- melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
 - melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
 - melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
 - A dan B benar
 - B dan C benar
32. Dalam RPJMN 2010—2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dengan strategi seperti...
- peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan
 - peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum
 - peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM
 - peningkatan kualitas pelayanan publik
 - semua benar
33. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010—2014 di antaranya adalah...
- penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat

- B. terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang
 - C. mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penang-gulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan
 - D. terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor
 - E. semua benar
34. Arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia di antaranya adalah...
- A. modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit
 - B. intensifikasi dan ekstensifikasi Patroli Keamanan Laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian
 - C. percepatan pembentukan komponen Pam Swakarsa
 - D. peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri
 - E. A, B, dan D benar

35. Dalam mencapai sasaran pembangunan, prioritas sub bidang politik luar negeri adalah peningkatan diplomasi dan kerja sama internasional dengan fokus prioritas di antaranya adalah...

- A. Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN
 - B. Peningkatan kerja sama Selatan-Selatan
 - C. Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan
 - D. A dan C Benar
 - E. A, B, dan C benar
36. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, ada empat komponen utama di dalamnya yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya adalah...
- A. investasi yang memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi
 - B. ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi
 - C. kebijakan menjaga daya beli
 - D. optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara
 - E. semua benar
37. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen permintaan domestik yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Daya

- beli masyarakat dijaga terutama melalui cara berikut, *kecuali...*
- menjaga stabilitas harga
 - mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial
 - meningkatkan kelancaran arus barang untuk menjaga ketersediaan barang terutama bahan pokok
 - meningkatkan perdagangan dalam negeri untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha
 - Menjaga stabilitas moneter
38. Mengingat pertambahan penduduk Indonesia tergolong cepat, maka program dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui tiga fokus prioritas di antaranya adalah...
- revitalisasi program KB
 - penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
 - peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu
 - A dan B benar
 - A, B, dan C benar
39. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan fokus prioritas di antaranya adalah...
- peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita
 - perbaiki status gizi masyarakat
 - pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan
 - pengembangan sumber daya manusia
 - semua benar
40. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui beberapa program berikut, *kecuali...*
- penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan
 - pemantapan/implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan
 - penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan
 - harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespon kebutuhan pasar yang dinamis

- C. menyatakan pendapat
D. A dan B benar
E. A, B, dan C benar
48. Anggota DPRD sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai hak di antaranya, *kecuali*...
- A. Mengajukan rancangan Perda
B. Mengajukan pertanyaan
C. Membela diri
D. Keuangan dan administratif
E. Penyidikan
49. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DPRD memiliki beberapa alat kelengkapan, *kecuali*...
- A. pimpinan
B. komisi
C. panitia musyawarah
D. badan musyawarah
E. panitia anggaran
50. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, DPRD provinsi beranggotakan...
- A. 35—75 orang dan 4 komisi
B. 30—70 orang dan 4 komisi
C. lebih dari 75 orang dan 4 komisi
D. 35—75 orang dan 5 komisi
E. 35—75 orang dan 3 komisi
51. Sesuai UU No 32 Tahun 2004, DPRD kabupaten/kota beranggotakan...
- A. 20—35 orang dan 3 komisi
B. 20—35 orang dan 4 komisi
C. 25—35 orang dan 3 komisi
D. 25—35 orang dan 4 komisi
E. lebih dari 35 orang dan 3 komisi
52. Perangkat daerah kabupaten/kota sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah...
- A. kecamatan
B. sekretariat DPRD
C. dinas daerah
D. lembaga teknis daerah
E. A, B, C, dan D benar
53. Berikut ini sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, *kecuali*...
- A. pajak daerah
B. retribusi
C. hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
D. dana perimbangan
E. danu alokasi sementara
54. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b dalam UU No.32 Tahun 2004 terdiri atas...
- A. Dana Bagi Hasil
B. Dana Alokasi Umum
C. Dana Alokasi Khusus
D. A dan B benar
E. A, B, dan C benar
55. Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sesuai UU No.32 tahun 2004, *kecuali*...
- A. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
B. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

- C. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- D. memroses temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan
- E. mengatur hubungan koordinasi antarpantia pengawasan pada semua tingkatan
56. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam...
- A. UU No.33 Tahun 2003
- B. UU No.33 Tahun 2004
- C. UU No.34 Tahun 2004
- D. UU No.35 Tahun 2004
- E. UU No.36 Tahun 2005
57. Sesuai UU No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah...
- A. dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- B. dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- C. dana yang bersumber dari pendapatan APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- D. dana yang bersumber dari pendapatan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- E. dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
58. Sesuai UU No.33 Tahun 2004, Dana Dekonsentrasi adalah...
- A. dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah
- B. dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- C. dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,

- tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah
- D. dana yang berasal dari Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah
- E. dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah
59. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 mempunyai fungsi orotisasi, perencanaan, dan...
- A. pengawasan
B. alokasi
C. distribusi
D. A, B, dan C benar
E. B dan C benar
60. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan revisi dari...
- A. UU Nomor 22 Tahun 1999
B. UU Nomor 25 Tahun 1999
C. UU Nomor 22 Tahun 2000
D. UU Nomor 25 Tahun 2000
E. UU Nomor 12 Tahun 1999

Page
4

KEWARGANEGARAAN DAN HAM

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. A | 22. E | 42. D |
| 2. B | 23. C | 43. D |
| 3. E | 24. D | 44. D |
| 4. A | 25. E | 45. B |
| 5. A | 26. C | 46. A |
| 6. E | 27. D | 47. B |
| 7. E | 28. A | 48. D |
| 8. E | 29. D | 49. B |
| 9. A | 30. A | 50. D |
| 10. C | 31. D | 51. A |
| 11. A | 32. C | 52. A |
| 12. B | 33. D | 53. A |
| 13. C | 34. E | 54. B |
| 14. E | 35. E | 55. E |
| 15. A | 36. D | 56. B |
| 16. C | 37. B | 57. D |
| 17. D | 38. A | 58. B |
| 18. B | 39. E | 59. C |
| 19. D | 40. C | 60. B |
| 20. C | 41. A | |
| 21. A | | |

Page
6

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN
OTONOMI DAERAH

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. B | 21. B | 41. C |
| 2. F | 22. C | 42. D |
| 3. A | 23. D | 43. E |
| 4. E | 24. B | 44. C |
| 5. B | 25. E | 45. B |
| 6. E | 26. B | 46. E |
| 7. F | 27. A | 47. E |
| 8. A | 28. E | 48. E |
| 9. A | 29. C | 49. D |
| 10. E | 30. B | 50. A |
| 11. C | 31. E | 51. A |
| 12. B | 32. E | 52. E |
| 13. E | 33. E | 53. E |
| 14. B | 34. E | 54. E |
| 15. E | 35. E | 55. D |
| 16. D | 36. E | 56. B |
| 17. A | 37. E | 57. A |
| 18. A | 38. E | 58. A |
| 19. A | 39. E | 59. D |
| 20. E | 40. E | 60. A |

Page
5

SEJARAH

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. C | 21. C | 41. A |
| 2. B | 22. E | 42. C |
| 3. D | 23. D | 43. B |
| 4. B | 24. C | 44. A |
| 5. C | 25. B | 45. A |
| 6. C | 26. E | 46. C |
| 7. D | 27. C | 47. D |
| 8. C | 28. C | 48. B |
| 9. A | 29. E | 49. G |
| 10. D | 30. E | 50. A |
| 11. B | 31. A | 51. A |
| 12. D | 32. B | 52. C |
| 13. C | 33. A | 53. C |
| 14. C | 34. D | 54. D |
| 15. C | 35. C | 55. C |
| 16. C | 36. C | 56. A |
| 17. B | 37. A | 57. D |
| 18. B | 38. A | 58. E |
| 19. E | 39. A | 59. E |
| 20. E | 40. A | 60. A |

Page
7

BAHASA INDONESIA

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. D | 21. B | 41. A |
| 2. C | 22. C | 42. B |
| 3. D | 23. D | 43. B |
| 4. B | 24. A | 44. B |
| 5. C | 25. D | 45. E |
| 6. B | 26. D | 46. A |
| 7. C | 27. C | 47. C |
| 8. A | 28. D | 48. C |
| 9. D | 29. B | 49. C |
| 10. D | 30. D | 50. A |
| 11. D | 31. B | 51. C |
| 12. B | 32. B | 52. B |
| 13. C | 33. C | 53. B |
| 14. C | 34. B | 54. C |
| 15. B | 35. A | 55. B |
| 16. B | 36. B | 56. D |
| 17. D | 37. C | 57. C |
| 18. C | 38. A | 58. C |
| 19. D | 39. C | 59. D |
| 20. B | 40. E | 60. A |